

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI WEBSITE DESA DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURUL SALAMIAH

NIM.12270521289

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2026**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nurul Salamiah
 Nim : 12270521289
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi E-Government Melalui Website Desa di Kecamatan Tambang
 Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Virna Museliza, S.E., M.Si

NIP.196608272023212005

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara



Dr. Desha Murtah, S.E., M.M., Ak

NIP. 19740412 200604 2 002

Dr. Khafrunyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Salamiah
 NIM : 12270521289
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi E-Government Melalui Website Desa
 di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 08 Januari 2026

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc. Sc

NIP.198304092023211016

Sekretaris

Meri Sandora, S.E., M.M

NIP.197905052007102001

Penguji I

Abdiana Ilosa, S.Ap., MPA

NIP.198707162015032003

Penguji II

Virna Museliza, S.E., M.Si

NIP.196608272023212005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Salamiah
 NIM : 12270521289
 Tempat/Tgl. Lahir: : Jambi/15 Juli 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Skripsi:

**"IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI WEBSITE DESA DI KECAMATAN
 TAMBANG KABUPATEN KAMPAR"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa .

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Nurul Salamiah
 NIM. 12270521289

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI WEBSITE DESA DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

NURUL SALAMIAH
NIM. 12270521289

Penelitian ini menganalisis implementasi e-government melalui website desa di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan studi kasus Desa Tarai Bangun dan Desa Aursati, didorong oleh pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendes PDTT No. 10/2020, di tengah kesenjangan digital di mana hanya sebagian dari 17 desa memiliki website aktif. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan (aparatur dan warga), observasi, dan dokumentasi, dianalisis melalui reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan model Miles dan Huberman untuk memvalidasi indikator teori Indrajit (2006). Hasil menunjukkan Desa Tarai Bangun berhasil dengan support regulasi kuat (Perdes No. 5/2024), capacity SDM operator khusus berbasis PC SID dan anggaran APBDes, serta value berupa layanan online cepat, transparansi APBDes dengan grafik Dana Desa, dan kunjungan website meningkat; sebaliknya, Desa Aursati gagal akibat tidak adanya Perdes, ketiadaan operator, sosialisasi minim, infrastruktur lemah, dan anggaran Rp45 juta tertunda, menyebabkan layanan manual dan ketergantungan pada sistem konvensional. Pembahasan mengungkap sinergi ketiga indikator sebagai penentu keberhasilan, di mana Tarai Bangun optimal melalui sosialisasi RT/RW-PKK dan rencana server lokal, sementara Aursati terhambat fragmentasi sumber daya dan literasi digital rendah pada lansia. Temuan ini krusial untuk replikasi model sukses di desa lain, menyimpulkan bahwa dukungan komprehensif esensial bagi e-government desa, serta merekomendasikan penerbitan Perdes wajib, pelatihan operator bersertifikat, sosialisasi door-to-door inklusif, dan evaluasi triwulanan oleh kecamatan untuk tata kelola digital yang transparan dan responsif.

Kata kunci: E-Government, Website Desa, Transparansi, Pelayanan Publik, Transformasi Digital.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT THROUGH THE VILLAGE WEBSITE IN THE TAMBANG DISTRICT, KAMPAR REGENCY

By:

NURUL SALAMIAH
NIM. 12270521289

This study analyzes the implementation of e-government through village websites in Tambang Sub-District, Kampar Regency, using case studies of Tarai Bangun Village (successful) and Aursati Village (failed), driven by the importance of digital transformation to enhance transparency, efficiency of public services, and community participation in line with Law No. 6 of 2014 and Permendes PDTT No. 10/2020, amid digital disparities where only some of the 17 villages have active websites. A qualitative descriptive method was employed, with primary data collection through in-depth interviews with 12 informants (village officials and residents), observations, and documentation, analyzed via data reduction, data display, and conclusion drawing using the Miles and Huberman model to validate the indicators of Indrajit's (2006) theory. Results indicate that Tarai Bangun Village succeeded due to strong regulatory support (Perdes No. 5/2024), dedicated human resource capacity with PC SID-based operators and APBDes funding, and tangible value from rapid online services, APBDes transparency with Dana Desa graphs, and increasing website traffic; conversely, Aursati Village failed owing to the absence of local regulations, lack of operators, minimal socialization, weak infrastructure, and delayed Rp45 million budget, resulting in manual services and reliance on conventional systems. The discussion reveals the synergy of these three indicators as key to success, with Tarai Bangun optimizing through RT/RW-PKK socialization and local server plans, while Aursati was hindered by resource fragmentation and low digital literacy among the elderly. These findings are crucial for replicating successful models in other villages, concluding that comprehensive support is essential for village e-government, and recommending mandatory Perdes issuance, certified operator training, inclusive door-to-door socialization, and quarterly evaluations by the sub-district to foster transparent and responsive digital governance

Keywords: *E-Government, Village Website, Transparency, Public Services, Digital Transformation.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat dari masa jahiliah menuju era keilmuan seperti saat ini.

Skripsi berjudul “Implementasi E-Government Melalui Website Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan kasih sayang orang-orang terkasih, khususnya kedua orang tua penulis, ibunda Gustina dan ayahanda Yadri. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama dan papa yang senantiasa memberikan dukungan sejak awal hingga penulis mencapai tahap ini.

Doa tulus, nasihat bijak, serta dukungan moril dan materiil yang diberikan tanpa henti telah menjadi penerang dalam setiap langkah penulis hingga berhasil menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada mereka. Aamiin, aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., S.E., M.Si., Ak, CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Hendry, S.E., M.Si., Ak, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.Sc., selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara.
8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP., M.Si., selaku pembimbing akademik penulis.
9. Ibu Virna Museliza, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, khususnya Jurusan Administrasi Negara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Kepala Desa dan seluruh pegawai Desa Tarai Bangun dan Desa Aursati, beserta masyarakat Desa Tarai Bangun dan Desa Aursati yang telah bersedia menjadi informan penelitian, atas bantuan, data, serta informasi yang diberikan kepada penulis.
12. Mama dan Papa yang telah mendukung penulis dari awal hingga penulis sampai pada titik ini. Penulis sangat berterimakasih atas doa, pengorbanan, kerja keras, dan support yang selalu mama dan papa berikan. Dukungan dari mama dan papa selalu menjadi alasan penulis menyelesaikan studi ini. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas segala kasih sayang yang tak hentinya mama dan papa berikan. Tanpa mama dan papa, penulis tidak akan mampu bertahan.
13. Sahabat seperjuangan penulis, Pelita dan Maria yang selalu membantu, menemani, dan menyemangati penulis, dari awal pemilihan dosen pembimbing, proses pengajuan judul, hingga penulis bisa selesai dalam proses penelitian. Terima kasih karena sudah bertahan, saling menguatkan dan selalu ada hingga akhir.
14. Terakhir, untuk seseorang yang selalu menyemangati penulis, dia yang selalu menjadi garda terdepan bagi penulis, dia juga yang menjadi orang pertama yang selalu ada ketika penulis membutuhkan sesuatu. Dia yang selalu meyakinkan penulis bahwa kita tidak gagal, kita hanya sedang berusaha dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk H, penulis ucapkan banyak terimakasih karena telah menjadi bagian terpenting dalam proses ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi akademisi, maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta mendapat ridha dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pekanbaru, 24 Desember 2025

Nurul Salamiah
12270521289



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Landasan Teori | 12 |
| 2.2 Pandangan Islam..... | 28 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu..... | 33 |
| 2.4 Definisi Konsep | 37 |
| 2.5 Konsep Operasional..... | 38 |
| 2.6 Kerangka Berpikir | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 41 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 41 |
| 3.3 Sumber Data Penelitian | 41 |
| 3.4 Informan Penelitian | 42 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 44 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DESA | 46 |
| 4.1 Desa Tarai Bangun | 46 |
| 4.2 Desa Aursati | 52 |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| BAB V | HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 62 |
| 5.1 | Support | 62 |
| 5.2 | Capacity | 66 |
| 5.3 | Value..... | 68 |
| 5.4 | Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi E-Government..... | 72 |
| BAB VI | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 76 |
| 6.1 | Kesimpulan..... | 76 |
| 6.2 | Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 78 |
| LAMPIRAN..... | | 82 |
| Lampiran 1 | | 82 |
| Lampiran 2 | | 91 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Data Desa di Kecamatan Tambang | 4 |
| Tabel 3.1 | Informan Penelitian | 42 |
| Tabel 4.1 | Penduduk Desa Tarai Bangun Berdasarkan Agama dan Penganutnya | 49 |
| Tabel 4.2 | Penduduk Desa Tarai Bangun Berdasarkan Tingkat Pendidikannya | 49 |
| Tabel 4.3 | Mata Pencarian Penduduk Desa Tarai Bangun Berdasarkan Pekerjaan | 50 |
| Tabel 4.4 | Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Agama dan Penganutnya | 55 |
| Tabel 4.5 | Sarana Ibadah | 56 |
| Tabel 4.6 | Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 57 |
| Tabel 4.7 | Lembaga Pendidikan di Desa Aursati | 57 |
| Tabel 4.8 | Mata Pencarian Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Pekerjaan | 58 |
| Tabel 5.1 | Perbandingan Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi E-Government..... | 75 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah layanan publik yang berkualitas. Salah satu tujuan utama penyediaan layanan publik adalah untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan penyediaan layanan publik berkualitas tinggi (Wardaniah, 2022). Teknologi informasi memainkan peran kritis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di era digital saat ini. Digitalisasi harus diwujudkan demi menjaga relevansi, legitimasi, dan efektivitas pemerintah dalam melayani warganya memerlukan digitalisasi administrasi publik.

Pemerintahan desa telah mengalami transformasi radikal berkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 82 dan 86, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa (Nabilah, 2017). Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan standar layanan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia telah mendorong digitalisasi layanan publik.

Dalam hal ini, konsep *e-government* telah menjadi strategi pelengkap yang krusial untuk mendorong transformasi digital sektor publik. Dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi publik serta memperkuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara masyarakat dan pemerintah melalui teknologi, *e-government* berfokus pada digitalisasi prosedur administratif dan layanan publik. Dengan bantuan sistem digital terintegrasi, pemerintah dapat merespons permintaan masyarakat dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, serta meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang (Mozin, Abdullah, & Sawali, 2025).

E-government di tingkat desa menjadi sangat relevan sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif bagi masyarakat desa. Diperkirakan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, atau *e-government*, akan meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas ketersediaan informasi, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan publik. Adaptasi pemerintah terhadap kemajuan teknologi informasi terlihat dalam penerapan *e-government* di daerah pedesaan, dengan tujuan utama mempercepat dan menyederhanakan prosedur administratif serta memberikan akses tak terbatas kepada masyarakat terhadap informasi (Yaya & Sukardi, 2025).

Implementasi *e-government* melalui website desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pelayanan publik secara digital, di mana kantor desa secara konvensional menyediakan beragam layanan administratif seperti penerbitan surat keterangan domisili, kematian, kelahiran, pindah datang, pengantar nikah, SKCK, SKTM, hingga pengantar bantuan sosial, usaha, dan keramaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep *e-government* yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya website desa, menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Website desa telah diidentifikasi sebagai salah satu media utama dalam mengimplementasikan *e-government* di tingkat desa. Website desa telah berkembang menjadi sumber daya yang penting untuk menyediakan informasi dan layanan administratif secara cepat, transparan, dan efektif kepada masyarakat.

Website desa tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai platform layanan publik berbasis digital, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus mengunjungi kantor desa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Salim, 2025) di Desa Kuala Selat yang menemukan bahwa pengelolaan website desa dapat meningkatkan efisiensi layanan administrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian di Desa Dasaok oleh (Khirdany & Anas, 2024) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem profil desa berbasis website dapat mengoptimalkan layanan informasi bagi masyarakat dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Website desa dapat menjadi platform yang menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui website desa mencakup berbagai aspek seperti berita terkini, pengumuman kegiatan, laporan keuangan, serta potensi-potensi desa yang dapat dikembangkan. Bahkan jika website desa dikelola dengan baik, warga desa akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengurus surat-surat yang dibutuhkan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses pembangunan desa dan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi publik serta mendapatkan kemudahan dalam mengurus surat-surat (Rakhimah, Lesmana, Santoso, Febriansyah, & Febrianita, 2024).

Namun, pada kenyataannya, tidak semua desa dapat mengelola website desa secara efektif. Dari 17 desa di Kecamatan Tambang, hanya sebagian desa yang telah memiliki website resmi, sementara sebagian desa lainnya belum memilikinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan digital antar desa dalam satu kecamatan yang memiliki kondisi geografis dan infrastruktur serupa. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Desa di Kecamatan Tambang

| No | Nama Desa | Status Website Desa | Keterangan |
|----|-------------------|---|--|
| 1 | Desa Aursati | Tidak berfungsi (mati suri sejak 2022/2023) | Website sebelumnya aktif, kini tidak aktif, pelayanan administrasi dilakukan secara manual |
| 2 | Desa Balam Jaya | Belum memiliki website | Belum ada website resmi desa |
| 3 | Desa Gobah | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://gobah.desa.id/ |
| 4 | Desa Kemang Indah | Belum memiliki website | Belum ada website resmi desa |
| 5 | Desa Kualu | Belum memiliki website | Belum ada website resmi desa |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----|--------------------|------------------------|--|
| | | website | |
| 6 | Desa Kualu Nenas | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://kualunenas.desa.id/ |
| 7 | Desa Kuapan | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://kuapan.desa.id/ |
| 8 | Desa Padang Luas | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://www.padangluas.desa.id/ |
| 9 | Desa Palung Raya | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://palungraya.desa.id/ |
| 10 | Desa Parit Baru | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://paritbaru-kampar.desa.id/ |
| 11 | Desa Pulau Permai | Belum memiliki website | Belum ada website resmi desa |
| 12 | Desa Rimbo Panjang | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://desa.rimbopanjang.kamparkab.go.id/first |
| 13 | Desa Sungai Pinang | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://sungaipinang.digitaldesa.id/ |
| 14 | Desa Tambang | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://tambang.desa.id/ |
| 15 | Desa Tarai Bangun | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

| | | | |
|----|--------------------|------------------------|--|
| | | | https://taraibangun.desa.id/ |
| 16 | Desa Teluk Kenidai | Sudah memiliki website | Website resmi desa tersedia. Dapat diakses melalui https://desatelukkenidai.com/ |
| 17 | Desa Terantang | Belum memiliki website | Belum ada website resmi desa |

Sumber: data olahan peneliti, hasil akses website desa di Kecamatan Tambang.

Penelitian ini sengaja memilih dua desa yang memiliki kondisi berbeda untuk melihat faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan. Salah satu desa yang memiliki website resmi yang aktif yaitu desa Tarai Bangun. Dapat dilihat sebagai berikut:



Desa Tarai Bangun dipilih sebagai contoh desa sukses karena website taraibangun.desa.id aktif dan berjalan optimal kunjungan yang terus meningkat tiap bulan. Di website desa Tarai Bangun tersedia informasi layanan, bisnis, kesehatan, pendidikan dan budaya, pertanian dan ternak, daftar usaha, serta berita desa dan pengumuman pengumuman yang bisa diakses secara online. Selain itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga tersedia berbagai data statistik yang diperlukan dan transparansi APBDes yang jelas dengan grafik Dana Desa yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Sebaliknya, Desa Aursati dipilih sebagai studi kegagalan karena website desa yang sebelumnya aktif kini tidak lagi berfungsi sejak 2022/2023, karena tidak dikelola dengan baik dan semua pelayanan administrasi dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan penurunan efisiensi pelayanan dan keterbatasan transparansi publik desa. Ketidaktersediaan platform digital menyebabkan masyarakat masih bergantung pada sistem manual yang tidak hanya memakan waktu lebih lama, tetapi juga berpotensi mengurangi kejelasan informasi yang disampaikan. Hal ini memperburuk kualitas pelayanan, menghambat partisipasi masyarakat, serta mengurangi tingkat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Penelitian mengenai implementasi *e-government* melalui website desa sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Website desa merupakan salah satu media digital yang dapat mempermudah akses informasi, transparansi pengelolaan pemerintahan, serta mempercepat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui digitalisasi layanan, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan lebih mudah, prosedur yang lebih cepat, dan pengurangan birokrasi yang signifikan. Hal ini diperkirakan akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa (Roza, 2024).



Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah desa, akademisi, dan pemangku kepentingan pembangunan desa. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi panduan dalam memperkuat implementasi *e-government* di tingkat desa, mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel dalam menghadapi era digitalisasi.

Berdasarkan Fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI WEBSITE DESA DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tingkat support, capacity, dan value menurut teori Indrajit (2006) pada implementasi e-government melalui website di Desa Tarai Bangun dibandingkan dengan Desa Aursati?
- b. Apa saja faktor yang menyebabkan keberhasilan implementasi di Desa Tarai Bangun dan kegagalan di Desa Aursati?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan membandingkan tingkat support, capacity, dan value implementasi e-government melalui website desa Tarai Bangun dan Aursati berdasarkan teori Indrajit (2006).
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan implementasi E-Government berbasis website di Desa Tarai Bangun dan Desa Aursati.



1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini memberikan panduan konkret dan rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh pemerintah Desa di Kecamatan Tambang yang belum memiliki website aktif untuk memulihkan dan mengoptimalkan fungsi website desa, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Manfaat bagi Masyarakat Desa

Masyarakat Desa Aursati dan 5 desa lain di Kecamatan Tambang akan mendapatkan akses layanan dan informasi yang lebih mudah, cepat, dan terbuka melalui website desa yang aktif seperti yang ada di Desa Tarai Bangun, sehingga meningkatkan partisipasi dan kepercayaan terhadap pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pelayanan publik.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam mengkaji implementasi *e-government* di tingkat desa, khususnya terkait pemanfaatan website desa sebagai sarana peningkatan pelayanan publik dan transparansi digital.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan uraian latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena dan isu yang menjadi dasar penelitian, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, mencakup hasil penelitian terdahulu, pandangan Islam terkait topik, definisi konsep mengenai judul yang diangkat, serta konsep operasional dan kerangka berpikir yang digunakan sebagai landasan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan terkait jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan validitas data penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA

Bab ini akan membahas gambaran umum desa tempat dilakukannya penelitian, yang mencakup sejarah desa, keadaan demografis, agama, pendidikan, mata pencaharian, visi dan misi, kondisi pemerintahan desa, serta struktur organisasi pemerintahan desa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini disusun secara sistematis mengikuti kerangka analisis teori Indrajit (2006) dengan tiga indikator utama, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Pembahasan dimulai dari pengantar umum yang menjelaskan fokus penelitian pada implementasi e-government melalui website desa di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menggunakan data primer wawancara aparaturnya dan warga dari Desa Tarai Bangun serta Aursati.

BAB VI

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua bagian utama. Yaitu kesimpulan yang merangkum temuan penelitian berdasarkan analisis tiga indikator teori Indrajit (2006) yang membandingkan keberhasilan implementasi e-government di Desa Tarai Bangun dengan kegagalan di Desa Aursati. Dan saran yang menyajikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep E-Government

2.1.1.1 Pengertian E-Government

Menurut (Nurmansyah, Kurniabudi, & Sandra, 2022), *Electronic Government*, yang juga dikenal sebagai *e-Government*, adalah penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi pemerintahan. *E-Government* sangat penting untuk membangun layanan publik yang efisien, transparan, bertanggung jawab, dan sukses guna mencapai tata kelola yang baik. Oleh karena itu, implementasi *e-Government* dapat menjadi cara untuk meningkatkan standar layanan publik dan memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat (Watrianthos, Nasution, & Syaifullah, 2019).

E-government adalah proses di mana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui aplikasi berbasis website, *e-Government* dapat memfasilitasi perubahan pada proses eksternal maupun internal pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan memberikan kemudahan akses informasi. Selain itu, implementasi *e-Government* juga berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah dan mengurangi biaya operasional



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan (Irawan, 2015).

E-government diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan berfungsi sebagai alat komunikasi yang efisien untuk menanggapi tuntutan masyarakat akan prosedur layanan yang cepat, akurat, dan sederhana. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan beberapa keuntungan utama yang diperoleh dari implementasi *e-government*. Selain itu, dengan meningkatkan akses informasi dan menyederhanakan prosedur layanan, *e-government* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Wiralestari, Sam, Arum, Malinda, & Wijaya, 2021).

Menurut World Bank, sebagaimana dikutip oleh (Lenak, Sumampow, & Waworundeng, 2021), penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan standar layanan yang diberikan kepada masyarakat umum dan perusahaan, serta untuk mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintah, dikenal sebagai *e-government*. World Bank juga menyoroti pentingnya *e-government* untuk memprioritaskan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ketersediaan informasi dan transparan untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Indrajit, sebagaimana dikutip oleh (Lestari & Fajr, 2022), *E-Government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. *E-Government*



bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan interaktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, *E-Government* dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pihak swasta, dan instansi lainnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat.

Penerapan Teknologi Informasi dalam pemerintahan desa memfasilitasi pengembangan *E-Government* Desa sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian pemerintahan desa. *E-Government* dalam konteks pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada pengembangan website desa, tetapi juga mencakup sistem terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa yang mendorong penerapan pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi (Watrianthos, Nasution, & Syaifullah, 2019).

2.1.1.2 Elemen Sukses Pengembangan E-Government

Menurut temuan studi dan penelitian dari Harvard JFK School of Government, tiga faktor keberhasilan perlu hadir dan diperhatikan dengan cermat agar konsep digitalisasi dapat diterapkan dengan sukses di sektor publik. Menurut (Indrajit, 2006), komponen-komponen keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Support* (Dukungan)

Dukungan politik dari otoritas publik sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi dan pengembangan *E-Government* yang sukses.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas sumber daya yang memadai diperlukan untuk membangun dan mengembangkan *E-Government* agar konsep yang dirancang dapat diimplementasikan secara efektif.

c. *Value* (Manfaat)

Value atau manfaat yang diperoleh baik oleh pemerintah sebagai penyedia layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan menjadi indikator keberhasilan *E-Government*, dengan masyarakat sebagai penentu utama besarnya manfaat yang diperoleh.

2.1.1.3 Manfaat Penerapan E-Government

Implementasi *e-government* adalah upaya mengembangkan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini muncul karena masyarakat sangat membutuhkan informasi yang terintegrasi, cepat, lengkap, serta akurat. Dengan begitu, diharapkan layanan publik jadi lebih berkualitas dan transparansi pemerintahan pun meningkat.

E-government saat diterapkan bisa mempermudah pengaturan sistem manajemen dan alur kerja di pemerintahan pusat maupun daerah otonom. Caranya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih efisien (Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah, 2022).

Kesiapan infrastruktur dan dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk kesuksesan implementasi E-Government. Menurut Ndou dalam (Rifdan, Haerul, Sakawati, & Yamin, 2024), dedikasi pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan dukungan dari dunia usaha serta lembaga akademik merupakan faktor kunci dalam kesuksesan e-government.

E-governance memiliki potensi untuk meningkatkan standar layanan publik. Sistem e-governance dapat secara efisien mendukung dan memastikan akses yang mudah ke layanan. Tata kelola yang baik dapat dicapai jika jaringan informasi digunakan secara terintegrasi di tingkat nasional dan lokal. Selain meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai inisiatif pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan layanan publik, memaksimalkan efektivitas otonomi daerah, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran, tujuan implementasi ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi pemerintah (Irma, Ginting, Agusmidah, & Leviza, 2023).

Berdasarkan karakteristik teknologi informasi yang digunakan dalam e-government, ada beberapa manfaat yang mencakup:

- a) Pengawasan publik yang lebih ketat, pemantauan real-time yang lebih intensif, dan prosedur penyampaian layanan yang lebih transparan semuanya berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Berkurangnya praktik korupsi karena komputer tidak memiliki sifat bawaan yang mendorong perilaku korupsi. Dalam sistem komputer, tidak ada yang terjadi kecuali jika hal tersebut direncanakan secara sengaja dan sistematis.
- c) Interaksi yang disederhanakan untuk meningkatkan layanan pemerintah, baik antara lembaga pemerintah (*government-government*), antara pemerintah dan dunia usaha (*government-business*), maupun antara pemerintah dan warga negara (*government-citizens*).
- d) Meningkatkan efisiensi pemerintah secara menyeluruh untuk mencegah pengeluaran publik yang tidak perlu atau ketidakefisienan dalam berbagai operasi.
- e) Tercipta efisiensi dalam skala ruang dan waktu.
- f) Struktur dan organisasi informasi yang tersistematisasi.
- g) Peningkatan terhadap sumber daya internal organisasi serta lingkup kendali.

Diharapkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan elektronik akan mendorong tata kelola yang baik guna mewujudkan visi negara dalam mencapai tujuannya.



2.1.2 Website Desa sebagai Media E-Government

2.1.2.1 Definisi dan Peran Website Desa

Untuk mengatasi kesalahan dalam pembuatan kebijakan di tingkat pusat, yang sering kali mengandalkan data usang dan tidak akurat dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah melalui website desa, pemerintah kini sedang mengembangkan penggunaan basis data pedesaan. Website ini diyakini dapat mempermudah tugas-tugas, mengubah data mentah menjadi data yang berguna dan siap digunakan, serta memungkinkan pejabat desa untuk menyampaikan hasil kinerja atau layanan yang tersedia di desa (Sibarani, 2021).

Di era digital ini, keberadaan website desa sangat penting karena memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan komprehensif kepada publik, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Desmayanty, Kanti, Faturahman, Arsitamara, & Lavenia, 2022).

Website adalah kumpulan halaman web yang terhubung dan memiliki struktur navigasi, memungkinkan pengguna berpindah antarhalaman dengan mudah. Halaman utama (*home page*) dari sebuah website berfungsi sebagai pintu masuk bagi pengunjung, yang kemudian dapat mengakses halaman lain melalui tautan atau hyperlink yang tersedia (Khairunnisa, Gumanti, Andriani, & Jannah, 2024).

Menurut (Werimon, Fahlevvi, & Buding, 2025) website desa merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* yang memungkinkan pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa untuk menyampaikan berbagai informasi secara daring kepada publik, termasuk informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, serta kegiatan pembangunan. Pemanfaatan website desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran.

Menurut Sonjaya dalam (Wijonarko, et al., 2024), keberadaan website desa merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyebaran informasi dan promosi potensi lokal. Website desa tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mempromosikan potensi wisata, seni, dan budaya desa secara luas.

Website dapat memudahkan perangkat desa untuk mengelola data populasi dengan lebih efisien, serta membuat pelaporan lebih mudah ke tingkat kecamatan. Tidak hanya memperbaiki ketidakadilan akses informasi yang ada di desa-desa yang kurang maju, tetapi juga mengembangkan teknologi berbasis website untuk menyampaikan keluhan dan informasi, tetapi juga tindakan yang direncanakan untuk meningkatkan kedaulatan lokal, mempercepat pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan (Corint & Voutama, 2024).



2.1.2.2 Fungsi Website Desa dalam Pelayanan Publik

Pengelolaan website desa sebagai media pelayanan berbasis digital merupakan salah satu upaya penting dalam memodernisasi layanan publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Website dapat berisi informasi tentang kebijakan desa, program pembangunan, peraturan, dan berita terkini.

Menurut Erianto dalam (Salim, 2025), penggunaan platform digital di pelayanan publik bisa meningkatkan efisiensi sambil mengurangi birokrasi yang sering bikin masyarakat repot saat mengurus layanan. Website desa, misalnya, jadi media digital yang memungkinkan warga mengakses administrasi tanpa harus datang ke kantor desa. Ini jelas menghemat waktu dan biaya, plus bikin akses layanan lebih mudah. Website desa ini contoh nyata pelayanan publik berbasis digital yang mempersempit proses jadi lebih cepat dan praktis bagi masyarakat.

Pengelolaan website desa sebagai media pelayanan berbasis digital merupakan salah satu upaya penting dalam memodernisasi layanan publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Website desa sebagai platform digital memungkinkan warga mengurus administrasi tanpa harus repot datang ke kantor desa. Ini jelas menghemat waktu dan biaya, sekaligus membuat akses layanan yang dibutuhkan menjadi lebih mudah (Salim, 2025).

Dalam era keterbukaan informasi, layanan publik harus tersedia secara luas di semua tingkatan masyarakat, selain itu juga harus cepat dan efektif. Website desa menjadi alat krusial untuk membentuk pemerintahan desa yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih responsif, efektif, dan transparan. Tujuannya mengembangkan situs ini adalah memperkenalkan serta mempromosikan potensi dan berbagai kegiatan pemerintahan desa ke masyarakat luas.

Terutama di daerah dengan keterbatasan geografis, ketersediaan media digital, seperti situs web desa, secara signifikan mempercepat penyampaian layanan. Namun, ketidakhadiran situs web dapat menyebabkan keterbatasan akses informasi, penyampaian layanan yang lambat, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Situs web desa oleh karena itu menjadi komponen penting dalam rencana untuk meningkatkan standar layanan publik, terutama di tingkat lokal (Siboro, Dahmiri, & Yanti, 2025).

Website desa menyediakan platform yang sangat penting bagi pemerintah desa untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan efektif. Sebelumnya, informasi mengenai kegiatan desa, potensi wisata, dan layanan publik seringkali hanya disebarkan melalui metode tradisional seperti pengumuman di papan informasi atau pertemuan tatap muka. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan desa, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa.

Secara keseluruhan, pemanfaatan website sebagai media informasi dan promosi desa merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan digitalisasi saat ini. Website desa tidak hanya menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi dan mempromosikan potensi lokal, tetapi juga sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan administrasi dan layanan publik. Implementasi website desa diharapkan dapat menjadi solusi yang signifikan untuk



meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunitas, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

2.1.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana masyarakat memperoleh layanan tersebut langsung dari pemerintah. Layanan publik didefinisikan sebagai tindakan atau rangkaian tindakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, atau layanan administratif. Penyediaan ini dilakukan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Layanan yang baik dan berkualitas tinggi adalah layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat karena mereka mengevaluasi kinerja layanan secara langsung. Tingkat kepuasan publik berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas pengelolaan pemerintahan. Semua orang menuntut layanan yang cepat dan tepat karena mereka semua ingin memaksimalkan waktu mereka. (Amba, Saleky, & Sahertian, 2023).

Berbagai tindakan yang diambil oleh institusi birokrasi publik untuk memenuhi beragam tuntutan dan kepentingan pengguna warga negara dapat disebut sebagai pelayanan publik. Seperti yang diketahui, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan sesuai dengan sejarah pendirian negara atau pemerintah. Akibatnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu warganya dalam memenuhi berbagai kebutuhan komunal, terutama kebutuhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dasar manusia. seperti rasa aman, rasa tenteram, dan lain-lain (Bazarah, Jubaidi, & Hubaib, 2021).

Pelayanan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh negara guna mencapai tujuan-tujuannya. Untuk menerapkan tata kelola yang baik, ketiga elemen dalam ruang tata kelola harus dapat bekerja dengan baik. Elemen-elemen yang dimaksud adalah: negara, sektor swasta, dan masyarakat. Elemen-elemen ini akan berinteraksi sesuai dengan fungsi yang harus mereka lakukan (Lestari & Santoso, 2022).

2.1.4 Konsep Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap krusial dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan. Program kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara efektif agar dapat memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan. Aplikasi, praktik, eksekusi, melakukan, atau melaksanakan suatu tindakan semuanya dianggap sebagai bentuk implementasi. Di sisi lain, suatu kegiatan termasuk dalam kegiatan publik (*public policy*) jika terkait dengan operasi pemerintah.

Implementasi kebijakan pada hakikatnya juga melibatkan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan hasil kebijakan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan oleh para pelaksana, beserta dampaknya terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau organisasi pemerintah maupun swasta untuk mencapai sasaran yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan dalam pilihan kebijakan tersebut disebut sebagai implementasi kebijakan (Roring, Mantiri, & Lopian, 2021).

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III (1980) dalam (Tiwa, Posumah, & Londa, 2023) ini dikenal dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Dia menjelaskan gagasan ini dalam bukunya “*Implementing Public Policy*” Menurut metode Edwards III, empat elemen berikut sangat penting agar kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan sukses yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan petunjuk kepada para pelaksana kebijakan. Kejelasan dan konsistensi komunikasi sangat penting agar pelaksana memahami maksud, tujuan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan. Penanggung jawab yang melaksanakan keputusan harus memahami apa yang harus dilakukan agar keputusan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Ketika menerapkan kebijakan, staf yang tepat harus diberi tahu tentang arahan tersebut, yang harus tepat, konsisten, dan mudah dipahami.

b. Sumberdaya

Setiap kebijakan memerlukan dukungan sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk keberhasilannya. Sumber daya manusia mencakup kualitas pelaksana beserta kapasitas mereka dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjangkau kelompok sasaran secara menyeluruh, sedangkan sumber daya keuangan merujuk pada kecukupan modal investasi untuk program atau kebijakan tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan, kedua sumber daya ini harus diperhitungkan secara matang, karena tanpa sumber daya manusia yang kompeten, pelaksanaan kebijakan akan berjalan lambat. Sementara itu, sumber daya keuangan menjamin keberlanjutan program, sehingga tanpa pendanaan yang cukup, kebijakan tidak dapat beroperasi secara efisien dan cepat dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

c. Disposisi

Disposisi menyoroti sifat-sifat yang sangat terkait dengan pelaksana kebijakan/program, yang paling penting di antaranya adalah bahwa mereka yang sangat berkomitmen dan jujur akan selalu bertahan melalui tantangan kebijakan. Pelaksana kebijakan harus dipandu oleh prinsip kejujuran agar dapat mematuhi standar program yang telah ditetapkan dalam kebijakan atau pedoman program terkait.

d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan komponen struktural penting dalam setiap organisasi, yang dijadikan pedoman oleh para pelaksana dalam



bertindak. Namun, struktur organisasi yang terlalu hierarkis sering kali menimbulkan birokrasi berlapis serta prosedur yang kompleks dan rumit, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas pengawasan. Akibatnya, operasi organisasi menjadi kaku.

2.1.5 Implementasi E-Government Melalui Website Desa

E-government merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan akses yang mudah bagi warga negara terhadap data publik. Upaya penciptaan *e-government* ini menjadi salah satu strategi efektif guna meningkatkan pelayanan publik secara berhasil dan efisien. Dengan demikian, melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi, *e-government* memungkinkan penataan ulang sistem manajemen serta proses kerja pemerintahan (Setiawan, Halimah, & Faidah, 2023).

Implementasi *e-government* melalui pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dapat memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola yang baik, termasuk masyarakat dan sektor bisnis, guna meningkatkan kualitas layanan secara efektif dan efisien. Melalui *e-government*, beragam layanan publik yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik kini dapat diakses secara daring, sehingga menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat sekaligus meningkatkan mutu pelayanan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan sistem informasi berbasis web menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pelayanan publik, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara daring dengan mudah, cepat, dan transparan. Melalui penerapan *e-government* via website, pemerintah dapat memperluas akses terhadap informasi dan layanan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. *E-Government* pada dasarnya merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam penyediaan layanan publik (Djabbari, B, Nugroho, Amiruddin, & Yanto, 2024).

2.1.6 Tahapan Implementasi E-Government

Proses implementasi e-government melibatkan tahapan terstruktur untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi pemerintahan. Tahapan utama mencakup perencanaan visi strategis, pengembangan regulasi pendukung, serta penerapan teknologi secara bertahap. Proses ini sering kali mengadopsi model empat tahap: kehadiran (*web presence*), interaksi, transaksi, dan transformasi (Priyanti, Dewi, Aisyah, & Hasyem, 2025).

2.1.6.1 Tingkat Persiapan

Tahap ini fokus pada pondasi awal, seperti pembuatan situs web sederhana untuk informasi publik dan pendidikan SDM melalui pelatihan e-government. Penyediaan akses publik via internet atau *Multipurpose Community Center* (MCC) juga dilakukan, disertai sosialisasi dan regulasi pendukung untuk membangun kesadaran (*awareness building*).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.6.2 Tingkat Pematangan

Di sini, situs web ditingkatkan menjadi interaktif dengan fitur search engine, tanya jawab, dan hyperlink antar lembaga pemerintah untuk komunikasi dua arah. Tahap ini menekankan keterhubungan (*interconnectivity*) agar informasi lebih mudah diakses masyarakat.

2.1.6.3 Tingkat Pemantapan

Tahapan ini memungkinkan transaksi elektronik, seperti pengisian formulir *online*, pembayaran digital, dan interoperabilitas data antarinstansi untuk layanan G2C, G2B, dan G2G. Integrasi sistem menjadi kunci agar proses berjalan mulus dan aman.

2.1.6.4 Tingkat Pemanfaatan

Pada tahap transformasi akhir, semua layanan terintegrasi secara holistik untuk mencapai *best practice*, dengan pengembangan proses efektif dan efisien berbasis teknologi canggih. Model ini mirip dengan *web presence*, *interaction*, *transaction*, dan *transformation* dalam literatur global.

2.2 Pandangan Islam

2.2.1 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pandangan Islam

Islam sangat menghargai pendidikan dan pengetahuan, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan Allah mencintai mereka yang mencari ilmu (Lubis, 2021). Sebagaimana disebutkan di dalam Hadits:



“Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin, sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu (HR Ahmad)”.

Dengan mengadopsi pemikiran kritis (QS. Al-Isra/17: 36), terbuka terhadap kebenaran dari semua sumber (QS. Az-Zumar/39: 18), dan terus-menerus menerapkan pemikiran kritis (QS. Yunus/10: 10), umat Islam dianjurkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, setiap Muslim harus berupaya mencapai keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat (QS. Al-Qashash/28: 77; QS. An-Nahl/16: 43; QS. Al-Mujadilah/58: 11; QS. At-Taubah/9: 122) (Budianto, Galih, & Kurnia, 2021).

Teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi, pendidikan, dan agama. Dalam perspektif Islam, teknologi informasi dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, terdapat juga risiko seperti pelanggaran privasi, informasi palsu, dan degradasi etika. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menyeimbangkan antara keuntungan teknologi informasi dan regulasi yang sesuai berdasarkan standar moral untuk memaksimalkan efek positif dan meminimalkan efek negatif.

Islam memandang pengembangan TIK sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup dan mendorong umatnya untuk terus maju dengan berinovasi. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menekankan pentingnya perubahan diri untuk mencapai kemajuan. Ayat ini mendorong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manusia untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi guna meningkatkan taraf hidup, sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan yang telah dicapai. Pemanfaatan TIK harus berlandaskan syariat Islam, dengan memperhatikan ketentuan halal dan haram. Teknologi yang sesuai dengan ajaran Islam dapat dimanfaatkan, sedangkan yang tidak sesuai tidak boleh digunakan. Dengan demikian, syariat Islam menjadi standar dalam pemanfaatan TIK (Muhaimin, Nurdin, & Alhabsyi, 2023).

2.2.2 Pelayanan Publik dalam Pandangan Islam

Islam sebagai sistem akidah, syariah, dan akhlak memiliki nilai-nilai luhur seperti persamaan derajat, persaudaraan, tanggung jawab, keadilan, kejujuran, dan akhlak mulia. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi umat manusia untuk hidup bermasyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Islam telah mengajarkan pentingnya memberikan pelayanan yang baik jauh sebelum konsep kualitas pelayanan modern dikembangkan. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267. Dengan berpegang pada nilai-nilai Islam, umat manusia dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup bersama (Rachmadi & Muslim, 2015).

Dalam Islam, pelayanan publik yang prima merupakan kewajiban bagi pemerintah dan aparatur sipil negara. Pelayanan publik harus dilakukan dengan baik, jujur, berkualitas, dan amanah, sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai sumber etika, praktek kegiatan beragama memiliki hubungan yang erat dengan kualitas layanan publik. Landasan bagi pemerintah dan pegawai negeri sipil



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan layanan publik berkualitas kepada masyarakat adalah etika. Islam mengajarkan bahwa melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Allah SWT merupakan ibadah dan akan mendapat pahala.

Dengan demikian, pelayanan publik yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab, tetapi juga menjadi amal ibadah bagi mereka yang melakukannya (Putra, 2021). Melayani orang lain dengan baik adalah prinsip moral yang ditekankan oleh agama dan seharusnya diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pegawai negeri dalam konteks pelayanan publik.

Orang-orang yang mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan mereka akan memahami bahwa kewajiban publik mereka merupakan bagian dari perbuatan baik yang akan dibalas di kemudian hari. Kejujuran, kualitas, dan kepercayaan menjadi aspek penting dalam pelayanan publik dalam perspektif Islam. Etika keagamaan menjadi pijakan bagi pegawai negeri dalam melayani masyarakat, sehingga kualitas layanan publik terkait erat dengan praktik keagamaan (Harahap & Soemitra, 2023).

2.2.3 Dampak Teknologi Informasi dalam Pandangan Islam

Semua aspek masyarakat saat ini didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, khususnya di kalangan generasi muda, termasuk komunitas Islam. Ada berbagai implikasi dari kemajuan teknologi ini; meskipun teknologi telah mempermudah kehidupan, terdapat juga kelemahan-kelemahan. Akibat dampak teknologi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

digital, berbagai faktor perlu dipertimbangkan, terutama terkait moral dan karakter generasi muda Muslim. Pada kenyataannya, sekularisme juga didukung oleh kemajuan teknologi ini. Karena teknologi informasi sebagian besar merupakan penemuan Barat, secara alami ia menyimpang dari prinsip-prinsip Islam dan Timur, yang menekankan etika, penghormatan terhadap orang lain, dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Meskipun begitu, teknologi informasi menawarkan opsi yang jauh lebih terjangkau. Dengan teknologi satelit, sebagian besar dunia Muslim dapat dengan cepat terhubung satu sama lain melalui telepon. Manfaat teknologi informasi disertai dengan sejumlah risiko yang perlu dipahami. Faktor pertama disini yaitu pengendalian. Orang-orang yang berhasil mengendalikan teknologi informasi akan menuai manfaatnya. Oleh karena itu, jika komunitas terpencil bergantung pada teknologi dari negara-negara maju, tidak ada gunanya memiliki program canggih untuk membangun jaringan komunikasi yang menghubungkan mereka.

Faktor kedua adalah ketidaklayakan. Teknologi informasi yang dikembangkan di Barat, atau lebih tepatnya, teknologi yang dirancang untuk pelanggan Barat, cenderung menekankan aspek-aspek destruktif dan mekanisme kontrol. Sardar dalam (Riska, Nurhadi, & Gassing, 2024) mengklaim bahwa ini adalah alasan utama mengapa dunia Muslim perlu mengembangkan kemampuan teknologi informasinya sendiri. Jika tidak dilakukan, hal ini akan meningkatkan ketergantungan pada negara-negara maju, yang akan memungkinkan negara-negara tersebut untuk terus

mendominasi ekonomi dan politik sambil sekaligus melemahkan dan menindas dunia Muslim.

2.3 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|--|--|--|
| 1 | Keramat Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Berbasis Website Di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka | Temuan studi ini menunjukkan bahwa efektivitas <i>e-Government</i> sebagian besar bergantung pada dukungan pemerintah desa, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, regulasi, sosialisasi, dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan layanan berbasis website masih menjadi masalah. Efisiensi dan transparansi layanan publik telah meningkat secara signifikan sebagai hasil dari implementasi <i>e-Government</i> di desa ini. | Menganalisis faktor support, capacity, dan value serta regulasi desa |
| 2 | (Fahrudin, 2024) Penerapan E-Government Dalam Pemanfaatan Website Go Digital Desa (Gides) Desa Keramat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi | Temuan studi menunjukkan bahwa warga Desa Keramat kini memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan publik dan informasi berkat penerapan situs web Go Digital Desa dan <i>e-government</i> . Namun, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk masalah keterlibatan masyarakat, disiplin pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan warga Desa Keramat. Pemerintah desa terus meningkatkan tingkat | Fokus pada pemanfaatan digital desa untuk transparansi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | |
|---|--|---|---|
| | Kalimantan Selatan | sosialisasi dan pelatihan serta infrastruktur teknologi informasi guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut. | |
| 3 | (Mahayoni & Wirantari, 2021) Pengembangan Website Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Bona, Gianyar | Hasil dari penelitian ini adalah pengantar <i>e-government</i> melalui pengembangan dan pengoperasian situs web desa sebagai bentuk layanan publik yang sederhana, berguna, dan efektif merupakan hasil dari penelitian ini. Pemerintahan desa menyediakan berbagai layanan, seperti penerbitan izin usaha, laporan keluhan, dokumen-dokumen yang diperlukan lainnya, dan layanan telepon yang penting. Masyarakat desa merasa puas dengan layanan publik yang mereka terima karena layanan-layanan tersebut dapat diakses dengan mudah melalui mekanisme atau prosedur yang sederhana. | Fokus pada tahapan transformasi pelayanan digital |
| 4 | (Mariam & Kudus, 2022) Analisis Penerapan Electronic Government (E-Gov) Di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung | Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi <i>e-government</i> di Desa Sekarwangi belum berjalan secara optimal akibat berbagai kendala. Salah satunya adalah distribusi informasi terkait implementasi <i>e-government</i> yang belum merata, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat desa. Selain itu, keterbatasan kapasitas disebabkan oleh minimnya | Fokus pada penerapan <i>e-governemnt</i> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | anggaran, infrastruktur teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai. | |
| 5 | (Salim, 2025) Pengolaan Website Desa Sebagai Media Pelayanan Berbasis Digital Di Desa Kuala Selat | Pengelolaan website desa telah berjalan baik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, meskipun menghadapi tantangan dalam pemeliharaan konten dan keterbatasan sumber daya manusia. Website ini berfungsi untuk menyebarkan informasi publik dan menyediakan layanan administrasi digital, seperti pengajuan surat keterangan, sehingga membantu masyarakat mendapatkan layanan tanpa harus mengunjungi kantor desa. | Fokus pada pengelolaan dan tantangan website desa. |
| 6 | (Atmajaya & Wirata, 2021) Peranan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring | Pelayanan publik disusun sederhana dan transparan, dengan prosedur yang sama untuk semua masyarakat tanpa diskriminasi. Meskipun struktur organisasi sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan tugas karena pegawai kesulitan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya. Keterbatasan konektivitas internet, distribusi informasi publik yang tidak memadai, dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi komputer merupakan hambatan utama dalam adopsi e-government. | Fokus pada penerapan <i>e-government</i> di Desa Sanding |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

| | | | |
|---|--|---|--|
| 7 | (Fikri, Amrillah, Selwa, & Rivai, 2021) Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis | Ada beberapa hambatan yang harus diatasi sebelum Sistem Informasi Desa berbasis website dapat diimplementasikan, termasuk ketersediaan internet yang tidak konsisten yang membuat masyarakat kesulitan mengakses situs web desa. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa juga masih terbatas, yang terlihat dari kurangnya tenaga khusus yang mampu mengelola website desa secara efektif. | Fokus pada pemanfaatan sistem informasi berbasis website. |
| 8 | (Kurniawan & Nurhidayat, 2024) Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Website (Studi Kasus Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang) | Penerapan sistem informasi pelayanan masyarakat berbasis website memberikan pengaruh signifikan dalam memudahkan akses layanan. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat lebih mudah dan efektif mengakses berbagai layanan dari dinas terkait melalui platform online yang disediakan. | Fokus pada pelayanan masyarakat berbasis web. |
| 9 | (Kurniawati & Mursyidah, 2023) Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo | Pemerintah desa mengintegrasikan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. | Berfokus pada pemanfaatan (TIK) untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | desa. |
| 10 | (Manaf, Kusbandrijo, & Puspaningtyas, 2023) Efektivitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Studi Di Desa Marga Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu | Digitalisasi meningkatkan efektivitas administrasi dan pelayanan masyarakat, tetapi kurangnya pemahaman masyarakat dan akses internet terbatas menjadi hambatan. | Fokus pada digitalisasi pemerintahan desa secara umum. |

2.4 Definisi Konsep

Definisi konsep diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas dan menghindari kesalahpahaman. Dalam penelitian ini, beberapa konsep yang digunakan akan didefinisikan secara spesifik untuk memberikan kerangka berpikir yang sistematis.

- Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (termasuk komputer, internet, dan aplikasi) oleh pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat umum dikenal sebagai e-government, atau pemerintah elektronik. Secara sederhana, *E-Government* bertujuan membuat pemerintahan lebih efisien, transparan, dan mudah dijangkau.
- Implementasi *E-Government* Melalui Website Desa adalah salah satu bentuk aplikasi praktis dari konsep pemerintahan elektronik di tingkat paling dasar, yaitu desa. Website desa berfungsi sebagai platform digital yang menghubungkan pemerintah desa dengan warganya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan penyampaian informasi secara real-time dan pelayanan yang lebih cepat.

- c) Kualitas pelayanan publik di desa merujuk pada tingkat kepuasan warga terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah desa. Kualitas pelayanan yang baik ditandai dengan layanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Dalam konteks e-government, kualitas ini dapat ditingkatkan melalui digitalisasi, di mana website desa menjadi jembatan untuk mengurangi waktu tunggu dan kesalahan manusia.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah definisi spesifik tentang bagaimana suatu variabel atau konsep akan diukur dan dioperasionalkan dalam penelitian. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

| Variabel Penelitian | Indikator | Sub Indikator |
|--|-------------|---|
| Implementasi E-Government Melalui Website Desa | 1. Support | a) Adanya keputusan kepala desa tentang pengelolaan website. b) Ketersediaan regulasi dan kebijakan pendukung e-government. c) Sosialisasi dan pelatihan untuk monitoring website |
| | 2. Capacity | a) Anggaran finansial yang memadai untuk pengembangan |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

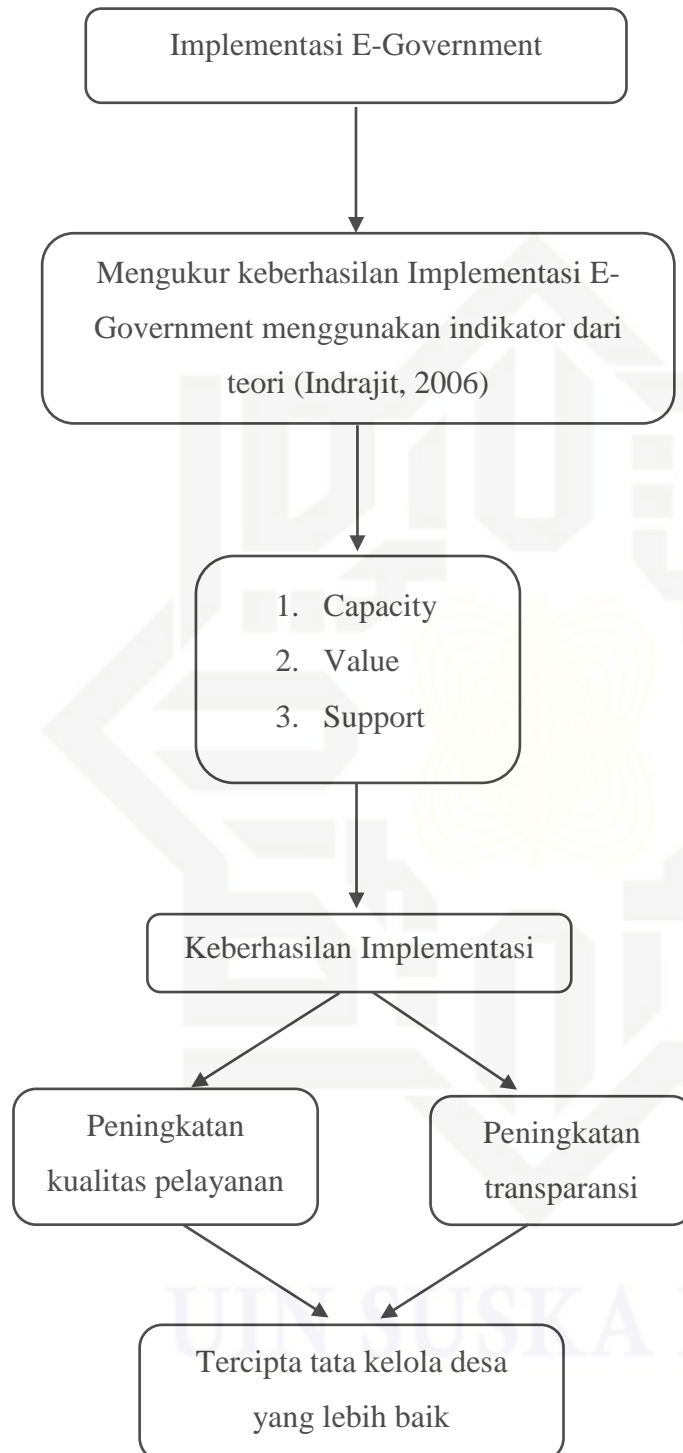
| | | |
|--|----------|---|
| | | dan pemeliharaan. b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. c) Kompetensi SDM. |
| | 3. Value | a) Peningkatan efisiensi layanan. b) Transparansi dan akuntabilitas informasi publik. c) Kepuasan masyarakat atas kecepatan layanan |

Sumber: (Indrajit, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kerangka Berpikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif dan sistematis bagaimana implementasi E-Government melalui website desa dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi di Desa.

Menurut Creswell (1998) dalam (Murdiyanto, 2020), Tujuan pendekatan kualitatif adalah menggunakan teknik investigasi mendalam untuk memahami kesulitan manusia dan fenomena sosial. Pendekatan ini melibatkan pembuatan gambaran kompleks, analisis kata-kata, dan pelaporan terinci dari perspektif responden dalam konteks alami.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Desa Tarai Bangun dan Kantor Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Penulis memilih lokasi ini untuk membandingkan pelayanan yang dilakukan dalam proses implementasi e-government melalui website desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dengan judul Implementasi E-Government Melalui Website Desa Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3.3 Sumber Data Penelitian

Kualitas dan akurasi temuan penelitian sangat bergantung pada sumber data yang digunakan dalam studi tersebut. Sumber data merujuk pada lokasi atau

tempat pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi asal-usul data tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Melalui penggunaan data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya melalui teknik seperti survei, observasi, dan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang andal dan relevan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti literatur, makalah ilmiah, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain, yang dimanfaatkan untuk mendukung serta memperkaya data primer (Nasution, 2023).

3.4 Informan Penelitian

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Informan Penelitian | Jabatan | Jumlah Orang |
|----|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | Maulinda | Kaur TU dan Umum Desa Tarai Bangun | 1 Orang |
| 2 | Ratna Wati | Kasi Pelayanan Desa Tarai Bangun | 1 Orang |
| 3 | Cecep Putra, S.Pd.I | Sekretaris Desa Aursati | 1 Orang |
| 4 | Lisa Ambriani, Amd | Kaur TU dan Umum Desa Aursati | 1 Orang |
| 5 | Roma Dona, S.T | Kaur Keuangan Desa Aursati | 1 Orang |
| 6 | Mulianti | Kasi Pelayanan Desa Aursati | 1 Orang |

| | | | |
|--------|----------------|-------------------------|----------|
| 7 | Kartini | Warga Desa Aursati | 1 Orang |
| 8 | Saipul, S.Ag | Warga Desa Aursati | 1 Orang |
| 9 | Asmar | Warga Desa Aursati | 1 Orang |
| 10 | Elina | Warga Desa Aursati | 1 Orang |
| 11 | Sumiati Agusti | Warga Desa Tarai Bangun | 1 Orang |
| 12 | Serli Aninda | Warga Desa Tarai Bangun | 1 Orang |
| Jumlah | | | 12 Orang |

Sumber: data olahan peneliti

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam observasi, peneliti dapat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan ini, baik sebagai peserta maupun sebagai penonton murni. Pendekatan observasi melibatkan studi langsung terhadap perilaku dan aktivitas peserta di lokasi penelitian, serta mendokumentasikan baik observasi terstruktur maupun tidak terstruktur.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung antara pewawancara dan responden untuk menggali informasi relevan terkait fokus masalah penelitian, dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Dalam hal ini, wawancara mendalam akan dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai dan pengguna aplikasi untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait percepatan proses administrasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan menemukan dan memperoleh bukti yang dapat diandalkan yang relevan dengan topik penelitian merupakan bagian dari proses pengumpulan data. Bahan dokumentasi menyimpan banyak fakta dan data dalam berbagai bentuk, seperti surat, catatan harian, foto, laporan, dan artefak. Autobiografi, surat pribadi, jurnal, guntingan koran, catatan pemerintah atau swasta, dan bahkan data digital yang disimpan di server, flash drive, atau situs web merupakan contoh dari jenis-jenis dokumen ini (Murdiyanto, 2020).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, dimulai sebelum penelitian lapangan, berlangsung selama penelitian lapangan, dan dilanjutkan setelah penelitian lapangan selesai. Menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh (Sugiyono, 2013), analisis data telah dimulai sejak tahap perumusan masalah dan berlangsung hingga penyusunan hasil penelitian. Analisis data kualitatif mencakup proses sistematis untuk mengorganisasi dan melacak transkrip wawancara, catatan lapangan, serta bahan lainnya guna menyajikan temuan penelitian. Model Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh (Murdiyanto, 2020) mengusulkan tiga tahap analisis data, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyaringan, pengkategorian, dan pengorganisasian data lapangan untuk memperoleh data yang valid dan relevan. Tujuannya adalah untuk memfokuskan data, menghilangkan yang tidak perlu, dan menyusun data agar dapat diinterpretasikan dengan tepat. Dalam proses ini, peneliti memverifikasi data dengan informan lain untuk memastikan keakuratannya.

b. Penyajian Data

Penyajian data mencakup pengorganisasian data yang telah dikumpul dan dianalisis ke dalam bentuk sistematis serta mudah dipahami, seperti narasi teks, grafik, tabel, atau bagan, guna memfasilitasi pemahaman dan penarikan kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data menjadi kategori berdasarkan tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah, sehingga memungkinkan identifikasi tipologi serta pola yang terkandung di dalamnya.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi melibatkan pengujian dan pengonfirmasian makna data untuk memastikan validitas dan kesesuaiannya dengan data yang diperoleh, sehingga informasi yang diperoleh akurat dan mendukung tujuan penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA

4.1 Desa Tarai Bangun

4.1.1 Sejarah Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun merupakan nama suatu wilayah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menurut sejarah berdirinya melalui pemekaran dari desa induk yaitu Desa Kualu. Awalnya desa Tarai Bangun adalah wilayah kedesunan yang terbagi menjadi 2 (Dua) wilyah yaitu dusun IV Tarai dan dusun V Rawa Bangun. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk, pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan Desa Tarai Bangun. Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya akhirnya pada Tahun 2002 lahir sebuah desa (Persiapan) Tarai Bangun dengan ditunjuk seorang pejabat sementara kepala desa (Pjs) Yaitu Bapak Zainur, hingga diangkat sebagai kepala desa definitif oleh bapak Bupati Kampar pada tahun 2004.

Hingga kini Desa Tarai Bangun terdiri dari IV dusun, yaitu sebagai berikut:

- a. Dusun I Tarai Bangun
- b. Dusun II Tarab Mandiri
- c. Dusun III Tarab Makmur
- d. Dusun IV Tarab Mulia

Menurut beberapa tokoh masyarakat, dulunya Desa Tarai Bangun adalah sebuah kampung yang sunyi dan terisolir, hal ini disebabkan Tarai Bangun saat itu sangat minim pembangunan infrastruktur, padahal kalau ditinjau dari letak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

geografis desa Tarai Bangun bersebelahan langsung dengan Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Pada tahun 1990 pemerintah Provinsi Riau melakukan pemetaan dan pembukaan akses jalan kubang raya yang membentang dan membelah Desa Tarai Bangun, pada saat itulah titik terang untuk membuka keterisoliran semakin terbuka lebar. Hari berganti hari dan waktu pun berlalu, dua dekade wajah Desa Tarai Bangun telah berubah menjadi sebuah desa yang padat kawasan hunian, hal ini tidak terlepas dari potensi dan geografis wilayah Desa Tarai Bangun.

Dalam roda pemerintahannya juga bergulir, hingga pada tanggal 15 juni 2008 Tarai Bangun melaksanakan pesta demokrasi PILKADES dengan jujur, adil dan kondusif. Dalam sejarah kepemimpinan desa, Desa Tarai Bangun telah dipimpin beberapa kepala desa sejak tahun 2002, dengan nama-nama sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Zainur | (2002-2006) |
| b. Tahzan Alfajri | (2006-2007) |
| c. Eka Putra | (2007) |
| d. Mudahir | (2007-2008) |
| e. Drs.H. Kamiruddin | (2008-2014) |
| f. Rakhmat, S.Sos | (2014) |
| g. Andra Maistar, S.Sos | (2014-2015) |
| h. Eka Putra | (2015) |
| i. Andra Maistar, S.Sos | (2015-2021) |
| j. Andra Maistar, S.Sos | (2021 s/d Sekarang) |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Keadaan Demografis Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun terletak didalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Karya Kotamadya Pekanbaru.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kelurahan Sialang Munggu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kulau/atau Desa Rimbo Panjang.

Luas wilayah Desa Tarai bangun adalah 1.700 Ha dimana wilayah berupa dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan kawasan padat hunian.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tarai Bangun pada tahun 2026 berdasarkan data kependudukan dari website Desa Tarai Bangun berjumlah 34.349 jiwa atau 9.182 kepala keluarga. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 17.410 jiwa dan perempuan sebanyak 16.939 jiwa.

4.1.4 Agama

Tabel 4.1 Penduduk Desa Tarai Bangun Berdasarkan Agama dan Penganutnya

| NO | JENIS AGAMA | FREKUENSI | PRESENTASE |
|---------------|--|-----------|------------|
| 1 | Islam | 32.879 | 95,72% |
| 2 | Kristen | 1.291 | 3,76% |
| 3 | Katholik | 146 | 0,43% |
| 4 | Hindu | 17 | 0,05% |
| 5 | Budha | 13 | 0,04% |
| 6 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME/Lainnya | 1 | 0,00% |
| Jumlah | | 34.349 | 100,00% |

Sumber Data: Website Desa Tarai Bangun 2026

4.1.5 Pendidikan

Masyarakat Desa Tarai Bangun memiliki tingkat pendidikan yang heterogen.

Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat desa tarai bangun yang dituangkan dalam tabel berikut dibawah ini:

Tabel 4.2 Penduduk Desa Tarai Bangun Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | FREKUENSI | PRESENTASE |
|---------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 5507 Orang | 16,03% |
| 2 | Belum tamat SD/Sederajat | 1999 Orang | 5,82% |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 5151 Orang | 15,00% |
| 4 | SLTP/ Sederajat | 5.078 Orang | 14,78% |
| 5 | SLTA/ Sederajat | 12.902 Orang | 37,56% |
| 6 | Diploma I/II | 153 Orang | 0,45% |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 867 Orang | 2,52% |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 2.522 Orang | 7,34% |
| 9 | Strata II | 158 Orang | 0,46% |
| 10 | Strata III | 12 Orang | 0,03% |
| Jumlah | | 34.349 Orang | 100,00% |

Sumber Data: Website Desa Tarai Bangun 2026

4.1.6 Mata Pencaharian

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tarai Bangun Berdasarkan Pekerjaan

| NO | JENIS PEKERJAAN | FREKUENSI |
|---------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 10.247 Orang |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 6.312 Orang |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 3.716 Orang |
| 4 | Pensiunan | 103 Orang |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 297 Orang |
| 6 | Perdagangan | 258 Orang |
| 7 | Petani/Pekebun | 196 Orang |
| 8 | Karyawan Swasta | 7.706 Orang |
| 9 | Buruh Harian Lepas | 738 Orang |
| 10 | Guru | 336 Orang |
| 11 | Pedagang | 471 Orang |
| 12 | Wiraswasta | 2.671 Orang |
| | Lainnya | 1.298 Orang |
| Jumlah | | 34.349 Orang |

Sumber Data: Website Desa Tarai Bangun 2026

4.1.7 Visi dan Misi Desa Tarai Bangun

a. Visi

“Mewujudkan desa tarai bangun SMART (Sejahtera Mandiri Adil dan Bermartabat)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

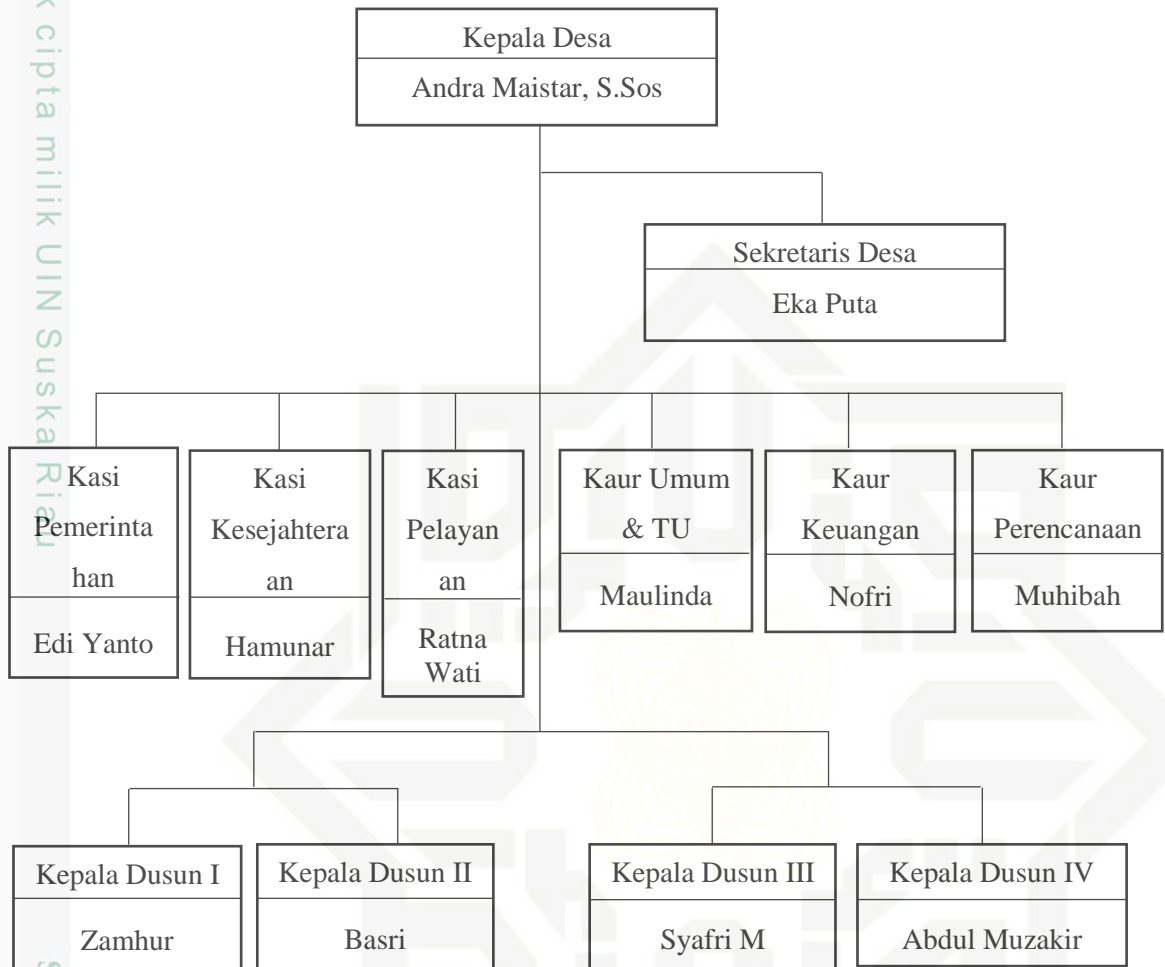
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup semua masyarakat desa tarai bangun dan segala bidang: agama, ekonomi, sosial seni budaya, olahraga, kesehatan, pendidikan serta pertahanan dan keamanan.
- 2) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah desa tarai bangun yang responsive, akuntabilitas, transparansi dan partisipatif serta mengembangkan sikap tanggung jawab lingkungan, inovatif inventif sebagai ciri khas integritas diri desa tarai bangun yang kreatif.
- 3) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan persatuan dalam pembangunan antar wilayah, kelompok masyarakat suku, bahasa, agama dan budaya erta tingkat sosial yang rendah.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.
- 7) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
- 8) Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD.
- 9) Peningkatan sarana prasarana kerja aparat desa dan BPD

4.1.8 Struktur Pemerintahan Desa Tarai Bangun



4.2 Desa Aursati

4.2.1 Sejarah Desa Aursati

Desa Aursati, yang terletak di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sekitar 3 km dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang, awalnya merupakan desa yang relatif muda. Terletak di pinggiran DAS (Daerah Aliran Sungai) sungai Kampar, terdapat desa yang menjadi bagian dari kenegerian Tambang, yang terdiri dari tiga Rukun Kampung, yaitu Rukun Kampung Aursati, Pulau Duit, dan Pulau Tengah. Desa muda Aursati meningkatkan statusnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Desa Aursati dengan mengganti dusun menjadi desa sesuai dengan perubahan peraturan administrasi desa.

Akibat pemekaran desa, Dusun Pulau Duit memisahkan diri dari Desa Aursati pada tahun 2001, sehingga Desa Aursati terbagi menjadi empat dusun. Kemudian, terjadi pemekaran lagi di Dusun II pada tahun 2014 sehingga total menjadi lima dusun berikut:

- a. Dusun I Aursati
- b. Dusun II Aursati
- c. Dusun III Pulau Tengah
- d. Dusun IV Bokuok
- e. Dusun V Aursati

Dalam sejarah kepemimpinan desa, Desa Aursati telah dipimpin beberapa kepala desa sejak tahun 1984, dengan nama-nama sebagai berikut:

- a. Abu Duyat (Datuk paduko majo) (1984-1986)
- b. Astamar malik, SH (1986-1988)
- c. Abbas. B (Datuk Gindo Pado) (1988-1999)
- d. Nasrun (Datuk Paduko siajo) (1999-2007)
- e. Sukarta (Plt) (2007-2008)
- f. Zulfahmi. A (2009-2013)
- g. Abd. Razak Dt. Gunung (Plt) (2013-2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Abd. Razak Dt. Gunung (2015-2021)
- i. Mohd. Yanis, S.E.I. (2021 s/d Sekarang)

Nama "Aursati" diambil dari dua kata, "Aur" yang berarti sejenis bambu yang tumbuh di tepi sungai yang biasanya menjadi tempat menambatkan sampan, dan "Sakti" yang berarti bertuah atau berkuasa. Desa ini juga dikenal sebagai tempat kerajaan Tambang dahulu, meskipun peninggalan kerajaan tersebut kini telah hilang akibat runtuhnya tebing sungai dan banjir.

4.2.2 Keadaan Demografis Desa Aursati

a. Batas Wilayah Desa

Desa Aursati memiliki luas wilayah sekitar 1.600 hektar dengan batas wilayah yang mengapit sungai Kampar dan desa-desa tetangga seperti Sungai Pinang, Kualu Nenas, Pulau Permai, dan Padang Luas.

b. Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Aursati ± 1.600 Ha, dimana ± 200 Ha pemukiman, ± 415 Ha pertanian sawah/ ladang, ± 630 Ha perkebunan, ± 100 Ha rawa-rawa, $\pm 0,5$ Ha rumah ibadah, ± 1 Ha perkantoran, ± 2 Ha sekolah, ± 250 Ha jalan, dan $\pm 1,5$ Ha lapangan sepak bola.

Pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Aursati Aursati secara langsung dipengaruhi oleh iklim desa tersebut, yang memiliki musim kemarau dan musim hujan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Orbitasi

a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4 Km

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit

b. Jarak ke ibu kota kabupaten : 25 KM

Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Aursati sebanyak 3.160 orang, dimana terdapat 729 Kepala Keluarga, 1.547cm orang laki-laki, dan 1.613 orang perempuan.

4.2.3 Agama

Ada 3.160 Muslim yang tinggal di Desa Aursati, yang merupakan mayoritas penduduk desa. Penduduk asli Desa Aursati memeluk agama Islam, sehingga wajar jika banyak Muslim yang tinggal di sini. Keyakinan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Agama dan Penganutnya

| NO | JENIS AGAMA | FREKUENSI | PRESENTASE |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | Islam | 3.160 | 100% |
| 2 | Kristen | - | % |
| 3 | Budha | - | % |
| 4 | Hindu | - | % |
| Jumlah | | 2.556 | 100% |

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5 Sarana Ibadah

| NO | SARANA IBADAH | FREKUENSI |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Masjid | 5 buah |
| 2 | Musholla | 5 buah |
| Jumlah | | 10 buah |

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

4.2.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu tolak ukur yang menentukan maju atau tidaknya suatu masyarakat. Hal ini berarti suatu komunitas akan mencapai kemajuan yang lebih besar jika tingkat pendidikan rata-ratanya lebih tinggi. Di sisi lain, kemajuan akan berkurang seiring dengan penurunan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu komunitas harus ditingkatkan, dikembangkan, dan diperkuat secara serius agar komunitas tersebut dapat maju dan berkembang secara tepat. Peningkatan program pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi merupakan bukti bahwa pemerintah telah mulai menyadari hal ini.

Di desa Aursati, pendidikan sangat dihargai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran di kalangan anak-anak yang dulu mengikuti jejak orang tua mereka dan mencari nafkah dengan bekerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga, namun kini jumlah mereka semakin berkurang dan lebih memilih untuk bersekolah. Banyak di antara mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan sekolah dasar, dan beberapa bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Anak-anak desa Aursati memiliki minat yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat terhadap pendidikan, yang menunjukkan hal ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 4.6 Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | FREKUENSI |
|---------------|--------------------|-------------|
| 1 | SD/ MI | 1.100 Orang |
| 2 | SLTP/ MTs | 1.060 Orang |
| 3 | SLTA/ MA | 600 Orang |
| 4 | S1/ Diploma | 200 Orang |
| 5 | Putus Sekolah | 123 Orang |
| 6 | Buta Huruf | 77 Orang |
| Jumlah | | 3.160 Orang |

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

Tabel 4.7 Lembaga Pendidikan di Desa Aursati

| NO | LEMBAGA PENDIDIKAN | FREKUENSI | LOKASI |
|---------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Gedung TK/PAUD | 2 buah | Dusun I dan II |
| 2 | SD/MI | 3 buah | Dusun I, II dan IV |
| 3 | SLTP/MTs | 1 buah | Dusun I |
| 4 | SLTA/MA | - | - |
| 5 | PDTA | 2 buah | Dusun I dan IV |
| Jumlah | | 8 buah | |

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

4.2.5 Mata Pencaharian

Penduduk Desa Aursati menjalani beragam mata pencaharian, meskipun mayoritas di antaranya bekerja sebagai petani dan pekebun. Kondisi ini dapat dipahami mengingat Desa Aursati merupakan kawasan pertanian dan perkebunan,

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Jenis-jenis pekerjaan penduduk Desa Aursati disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Mata Pencarian Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Pekerjaan

| NO | JENIS PEKERJAAN | FREKUENSI |
|----|-----------------|--------------|
| 1 | Petani | ± 1000 Orang |
| 2 | Pedagang | ± 500 Orang |
| 3 | PNS | ± 70 Orang |
| 4 | Tukang | ± 40 Orang |
| 5 | Guru | ± 100 Orang |
| 6 | Bidan/ Perawat | ± 10 Orang |
| 7 | TNI/ Polri | ± 4 Orang |
| 8 | Pesiunan | ± 15 Orang |
| 9 | Sopir/ Angkutan | ± 80 Orang |
| 10 | Buruh | ± 30 Orang |
| 11 | Swasta | ± 200 Orang |

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

4.2.6 Visi dan Misi Desa Aursati

a. Visi Desa

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Aursati Yang Lebih Maju”

Rumusan visi ini mengekspresikan niat mulia untuk meningkatkan pembangunan dan tata kelola Desa Aursati, baik secara individu maupun institusional, sehingga dalam enam tahun ke depan, Desa Aursati akan mengalami perubahan positif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi. Desa Aursati akan mengalami transformasi positif dan peningkatan kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat selama enam tahun ke depan, berkat pendekatan kolaboratif dalam administrasi pemerintahan dan pembangunan.

b. Misi Desa

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Aursati yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.7 Kondisi Pemerintahan Desa Aursati

a. Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- 1) Kepala Desa : 1 Orang
- 2) Sekretaris Desa : 1 Orang
- 3) Perangkat Desa : 5 Orang
- 4) BPD : 11 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | |
|------------------|--------------|
| a. LPM | : 12 Orang |
| b. PKK | : 70 Orang |
| c. Posyandu | : 2 Pos |
| d. Pengajian | : 8 Kelompok |
| e. Arisan | : 5 Kelompok |
| f. Simpan Pinjam | : 1 Kelompok |
| g. Kelompok Tani | : 6 Kelompok |
| h. Ormas | : 2 Ormas |
| i. Lain-lain | : 5 Kelompok |

c. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) Dusun I Aursati | : Jumlah 2 RT/ 2 RW |
| 2) Dusun II Aursati | : Jumlah 2 RT/ 2 RW |
| 3) Dusun III Pl. Tengah | : Jumlah 2 RT/ 2 RW |
| 4) Dusun IV Bokuok | : Jumlah 2 RT/ 2 RW |
| 5) Dusun V Aursati | .. Jumlah 2 RT/ 2 RW |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aursati

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA AURSATI

KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kantor Desa Aursati

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kepala desa | : MOHD. YANIS, S.E.I |
| Sekretaris Desa | : CECEP PUTRA, S.Pd.I |
| Kaur Keuangan | : ROMA DONA, ST. |
| Kasi Pemerintahan | : HASAN BASRI |
| Kaur Perencanaan | : WINDA NUR AFNI |
| Kasi Kesra | : INDRA PERDANA, SH. |
| Kaur Umum | : LISA AMBRIANI |
| Kasi Pelayanan | : MULIANTI |
| Kepala Dusun | |
| a. Dusun I Aursati | : MUHAMMAD ILYAS |
| b. Dusun II Aursati | : CECEP PUTRA (Pjs) |
| c. Dusun III Pl. Tengah | : ADE DARMAWAN |
| d. Dusun IV Bokuok | : FRAN SETIAWAN BENNY AZMAN |
| e. Dusun V Aursati | : RORI JUNAIDI |



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Implementasi e-government melalui website desa di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menunjukkan hasil beragam tergantung kekuatan tiga faktor utama menurut teori Indrajit (2006), yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Desa Tarai Bangun berhasil karena dukungan regulasi lengkap dari tingkat nasional hingga desa, seperti Permendes PDPTT No. 10/2020 dan Perdes No. 5/2024, ditambah sosialisasi rutin lewat rapat RT/RW serta PKK yang meningkatkan kunjungan website harian. Sebaliknya, Desa Aursati gagal meski punya potensi anggaran besar, karena lemahnya regulasi lokal, minimnya sosialisasi, dan ketiadaan operator khusus yang menyebabkan website mati total.

Pada aspek *capacity*, Tarai Bangun unggul dengan SDM operator khusus, PC-SID berbasis APBDes, dan rencana server lokal meski ada kendala sinyal internet. Ini kontras dengan Aursati yang dana Rp45 juta untuk OpenSID dan anjungan digital tertunda akibat birokrasi dan beban kerja aparatur ganda. Value atau manfaat nyata terlihat jelas di Tarai Bangun melalui layanan cepat seperti SKTM online selesai 24 jam, transparansi APBDes, serta kepuasan warga yang hemat waktu dan biaya. Di Aursati, manfaat ini hilang karena layanan manual, meski warga dan aparatur berharap aktivasi ulang untuk efisiensi serupa.

Secara keseluruhan, keberhasilan Tarai Bangun lahir dari sinergi ketiga faktor yang didorong komitmen kepala desa, sementara kegagalan Aursati disebabkan fragmentasi SDM dan sosialisasi yang kurang inklusif, terutama bagi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lansia dengan kesenjangan digital. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi desa wajib, pelatihan operator, dan literasi digital merata agar e-government bisa direplikasi di desa lain.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan yang ada, peneliti merekomendasikan beberapa langkah praktis untuk mengatasi kendala serupa di desa lain.

Pertama, setiap desa wajib menerbitkan Perdes khusus tentang pelayanan publik berbasis elektronik dalam waktu 6 bulan, lengkap dengan surat edaran kepala desa untuk update harian website, guna mengikat komitmen aparatur.

Kedua, pemerintah kecamatan dan kabupaten harus menunjuk operator website desa khusus (bukan jabatan ganda) melalui pelatihan bersertifikat OpenSID minimal 3 hari, didanai APBDes 5-10%, serta merealisasikan anggaran TI tepat waktu dengan monitoring bulanan untuk hindari birokrasi lama.

Ketiga, tingkatkan sosialisasi inklusif dengan program *door-to-door* dan video tutorial sederhana untuk lansia, integrasikan literasi digital ke PKK/RT bulanan, serta kerjasama dengan anak muda desa sebagai “*digital champion*” untuk membantu warga akses layanan online.

Keempat, atasi kendala infrastruktur dengan rencana server lokal offline-online hybrid di setiap desa mulai 2026, bekerja sama ISP agar sinyal lebih stabil, dan evaluasi triwulanan berdasarkan indikator Indrajit (*support, capacity, value*) agar keberhasilan Tarai Bangun bisa direplikasi secara luas di Kecamatan Tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amba, N., Saleky, S. R., & Sahertian, O. L. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Administrasi Terapan*, Vol. 2, 232-239.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia). *Jurnal Dedikasi*, Vol. 22, 105-122.
- Budianto, M. R., Galih, T. R., & Kurnia, S. F. (2021). Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 55-61.
- Corint, P. L., & Voutama, A. (2024). Implementasi Website Desa Sebagai Media Informasi Masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang. *Jati(Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 12268-12275.
- Desmayanty, A., Kanti, A. H., Faturahman, D. T., Arsitamara, L., & Lavenia, N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Sindangsari. *Prosiding Seminar Nasiona*, 58-64.
- Djabbari, M. H., B, I., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Berbasis Website Di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol 10, 158-170.
- Fahrudin, M. K. (2024). Penerapan E-Government Dalam Pemanfaatan Website Go Digital Desa (Gides) Desa Keramat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ipdn*, 1-12.
- Harahap, R. H., & Soemitra, A. (2023). Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektifekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7–11.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Paradigma*, 200-209.
- Irma, N., Ginting, B., Agusmidah, & Leviza, J. (2023). Penerapan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Binjai. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol. 2, 454-466.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah. (2022). *Membangun Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran Good Governance Dan E-Government* (Vol. Vol. 02). Bandar Lampung: Cv. Amerta Media.
- Khairunnisa, Gumanti, N. Z., Andriani, F., & Jannah, M. (2024). Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Panda Berbasis Web. *Teknimedia*, 56-61.
- Khirdany, E. N., & Anas, Z. (2024). Efektivitas Penggunaan Website Di Desa Sebagai Layanan Informasi Untuk Masyarakat. *Journal Of Economics And Business*, 1-10.
- Lenak, S. M., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1-9.
- Lestari, I. P., & Fajr, M. N. (2022). Analisis E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Sikap Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 10-23.
- Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 2, 43-55.
- Lubis, M. S. (2021). Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*, 79-88.
- Mahayoni, G. A., & Wirantari, I. D. (2021). Pengembangan Website Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Bona, Gianyar. *Journal Of Contemporary Public Administration (Jcpa)*, Vol 1, 13-15.
- Mariam, & Kudus, I. (2022). Analisis Penerapan Electronic Government (E-Gov) Di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" Fisip Universitas Al-Ghifari*, Vol 3, 39-50.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 145-151.
- Mozin, S. Y., Abdullah, S., & Sawali, N. (2025). Pemanfaatan Teknologi Cerdas Untuk Pelayanan Publik: Study Tentang E-Government Dan Smart City Berbasis Ict Big Data Dan Ai. *Journal Of Publicness Studies (Jps)*, Vol. 02, 117-130.
- Muhaimin, A., Nurdin, N., & Alhabsyi, F. (2023). Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Menurut Pandangan Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 92-96.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nabilah, A. (2017). Penerapan Website Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Publika*, 1-5.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Harfa Creative.
- Nurmansyah, F., Kurniabudi, & Sandra, D. (2022). Perancangan Aplikasi E-Government Pengolah Data Kependudukan Berbasis Web Pada Kantor Desa Sumber Harum. *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi(Jms)*, 178-186.
- Putra, N. H. (2021). Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 1-16.
- Rachmadi, M., & Muslim. (2015). Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam (Studi Di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Pekanbaru). *Juris*, 45-67.
- Rakhimah, F. A., Lesmana, S. B., Santoso, C. S., Febriansyah, R., & Febrianita, R. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital Melalui Pengembangan Website Desa Di Desa Latsari, Mojowarno. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, Vol.2*, 122-130.
- Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis Penerapan E-Governmentdalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal Governance And Politics (Jgp)*, Vol. 4, 49-61.
- Riska, Nurhadi, A., & Gassing, Q. (2024). Tantangan Teknologi Informasi Perspektif Hukum Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 328-337.
- Roza, V. D. (2024). Penerapan Prinsip E-Government Dalam Pemerintahan Desa Melalui Aplikasi Gigades Sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Digital Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Seminar Nasional Amikom Surakarta (Semnasa)*, 1342-1354.
- Salim, A. (2025). Pengolaan Website Desa Sebagai Media Pelayanan Berbasis Digitaldi Desa Kuala Selat. *Asiatek: Jurnal Sains Dan Teknik*, 1-6.
- Salim, A. (2025). Pengolaan Website Desa Sebagai Media Pelayanan Berbasis Digitaldi Desa Kuala Selat. *Asiatek: Jurnal Sains Dan Teknik, Vol. 2*, 1-6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Setiawan, A., Halimah, M., & Faidah, R. N. (2023). Implementasi E-Government Berbasis Situs Web. *Indonesian Journal Of Education And Social Science*, Vol. 2, 7-12.
- Sibarani, G. (2021). Peran Website Desa Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Nglanggeran Dan Desa Girijati Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Tataloka*, Vol. 23, 418-429.
- Siboro, W., Dahmiri, & Yanti, O. (2025). Dampak Keberadaan Website Desa Sebagai Layanan Publik Dan Informasi Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir. *Masman: Master Manajemen*, Vol. 3, 129-136.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Wardaniah, R. (2022). Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Publik*, Vol.6, 1-7.
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Syaifullah, M. (2019). Model E-Government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah Unikom*, 53-60.
- Werimon, A. P., Fahlevvi, M. R., & Buding, A. (2025). Peran Website Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Pemerintah Di Timika Jaya. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, Vol. 9, 1-13.
- Wijonarko, P., Cahya, R. D., Purnomo, B. A., Iswanto, W., Burhanudin, B., & Akbar, R. (2024). Pengenalan Website Sebagai Media Informasi Dan Promosi Desa. *Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, Vol. 2, 198-208.
- Wiralestari, Sam, I., Arum, E. D., Malinda, I., & Wijaya, R. (2021). Pemanfaatan E-Government di Masa Pandemi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Karya Abdi*, 497-501.
- Yaya, R., & Sukardi. (2025). Pengaruh Implementasi E-Government Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 10, 69-81.
- Yurmaini, Erliyanti, Sundari, D., & Anshar, K. (2024). Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 83-90.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : Maulinda

Jabatan : Kaur TU dan Umum Desa Tarai Bangun

Waktu : 12 Januari 2026

Tempat : Kantor Desa Tarai Bangun

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Apakah sudah ada Perdes atau kebijakan desa yang secara khusus mengatur pengelolaan dan pemeliharaan website desa Tarai Bangun? Bagaimana proses pembentukan regulasi tersebut? |
| 2 | Berapa besar anggaran APBDes yang dialokasikan setiap tahun untuk operasional website desa (domain, hosting, pemeliharaan)? Bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan anggaran tersebut? |
| 3 | Fasilitas TI apa saja yang tersedia di kantor desa untuk mendukung website? |
| 4 | Siapa saja tim operator website dan bagaimana pembagian tugasnya? |
| 5 | Bagaimana transparansi APBDes dan grafik Dana Desa di website mempengaruhi kepercayaan warga? |



B. Narasumber 2

Nama : Ratna Wati

Jabatan : Kasi Pelayanan Desa Tarai Bangun

Waktu : 12 Januari 2026

Tempat : Kantor Desa Tarai Bangun

| No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1 | Sejauh mana sosialisasi website desa telah dilakukan ke masyarakat? Apakah ada kendala dalam sosialisasi tersebut? |
| 2 | Apakah ada kendala dalam sosialisasi tersebut? |
| 3 | Apakah operator website sudah mendapatkan pelatihan teknis dari Desa Digital atau dinas terkait? |
| 4 | Bagaimana koordinasi antar-staff desa dalam pengelolaan konten website? |
| 5 | Dari pengalaman pelayanan langsung, apakah website telah mempercepat proses layanan atau malah memperlambat? |
| 6 | Feedback warga apa yang paling sering diterima terkait kemudahan akses informasi website? |
| 7 | Apakah website mengurangi antrian dan birokrasi pelayanan administrasi? |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Narasumber 3

Nama : Sumiati Agusti

Jabatan : Warga Desa Tarai Bangun

Waktu : 13 Januari 2026

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Apa ibu pernah mendengar sosialisasi dari pemerintah desa terkait website desa ini? |
| 2 | Apa website desa ini gampang diakses dari HP dan sinyal internetnya bagaimana? |
| 3 | Sebelumnya ibu sudah pernah menggunakan website desa untuk apa saja, dan apa membuat hidup lebih mudah? |
| 4 | Menurut ibu informasi yang ada di website apa sudah transparan, misalnya terkait anggaran atau program desa? |
| 5 | Bagaimana pendapat ibu terkait pelayanan melalui website, dibanding datang langsung ke kantor? |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Narasumber 4

Nama : Serli Aninda

Jabatan : Warga Desa Tarai Bangun

Waktu : 13 Januari 2026

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Apa pernah mendengar sosialisasi dari pemerintah desa terkait website desa ini? |
| 2 | Apa ibu pernah mengakses websitenya dan mengajukan layanan mandiri? |
| 3 | Apa ibu merasa terbantu dengan adanya pelayanan secara online? |
| 4 | Bagaimana pendapat ibu terkait pelayanan melalui website, dibanding datang langsung ke kantor? |

E. Narasumber 5

Nama : Cecep Putra, S.Pd.I

Jabatan : Sekretaris Desa Aursati

Waktu : 09 Oktober 2025

Tempat : Kantor Desa Aursati

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Bagaimana proses penyampaian kebijakan terkait pengelolaan website desa dari kepala desa ke staf pengelola sebelumnya? |
| 2 | Apakah penjelasan terkait penggunaan website desa sudah jelas untuk semua orang? |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|---|
| 3 | Siapa yang seharusnya mengelola website saat masih aktif? |
| 4 | Apakah ada operator yang terlatih SID atau web development di desa saat ini? |
| 5 | Apa hambatan birokrasi yang menyebabkan penundaan penunjukan operator website desa? |

F. Narasumber 6

Nama : Lisa Ambriani, Amd

Jabatan : Kaur TU dan Umum

Waktu : 09 Oktober 2025

Tempat : Kantor Desa Aursati

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Sejauh mana komitmen dan integritas aparatur desa dalam mewujudkan pelayanan digital melalui website desa? |
| 2 | Bagaimana perencanaan pengaktifan website desa dan mesin anjungan digital tahun ini? |
| 3 | Sudah ada petunjuk teknis dari pemerintah atas untuk pelaksanaan e-government desa? |
| 4 | Fasilitas TI apa saja yang tersedia sekarang (internet, komputer)? Mengapa infrastruktur tidak dimanfaatkan untuk reaktivasi website? |
| 5 | Bagaimana feedback warga terkait ketiadaan website sekarang? Apakah ada keluhan akses informasi desa? |



G. Narasumber 7

Nama : Roma Dona, S.T

Jabatan : Kaur Keuangan

Waktu : 09 Oktober 2025

Tempat : Kantor Desa Aursati

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Apakah desa memberikan anggaran khusus untuk pemeliharaan dan pengembangan website desa? |
| 2 | Kapan anggaran tersebut dapat digunakan? |
| 3 | Fasilitas apa saja yang disediakan desa untuk mendukung operasional website desa, misalnya perangkat komputer, koneksi internet? |
| 4 | Bagaimana sistem pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk website desa saat ini? |
| 5 | Apakah ada petugas/operator yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola dan memperbarui website desa? |
| 6 | Bagaimana pengelolaan anggaran dan fasilitas untuk e-government agar bisa dimanfaatkan secara efektif, mengingat website saat ini tidak aktif? |

H. Narasumber 8

Nama : Mulianti

Jabatan : Kasi Pelayanan

Waktu : 09 Oktober 2025

Tempat : Kantor Desa Aursati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Mengapa website desa saat ini tidak aktif? |
| 2 | Bagaimana prosedur pengajuan surat online jika website sudah aktif |
| 3 | Apa kendala utama dalam pengelolaan dan update data website desa? |
| 4 | Apa manfaat website bagi percepatan layanan administrasi seperti surat keterangan? |

I. Narasumber 9

Nama : Kartini

Jabatan : Warga Desa

Waktu : 11 Oktober 2025

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1 | Apa ibu pernah mendengar informasi tentang website desa dan kapan terakhir? |
| 2 | Bagaimana pengalaman mengurus surat secara manual ke kantor desa? |
| 3 | Apakah pemerintah desa pernah menjelaskan manfaat website secara konsisten? |
| 4 | Apa informasi yang kurang jelas tentang rencana pengaktifan website desa? |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

J. Narasumber 10

Nama : Saipul, S.Ag

Jabatan : Warga Desa

Waktu : 12 Oktober 2025

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1 | Apa yang Anda ketahui tentang website desa Aursati? |
| 2 | Apakah Anda pernah mencoba akses website desa? |
| 3 | Bagaimana pendapat Anda jika bisa urus surat online tanpa bolak-balik? |
| 4 | Bagaimana perbandingan urus surat manual vs online menurut Anda? |
| 5 | Bagaimana informasi tentang website disampaikan kepada Anda? |
| 6 | Apa informasi yang kurang jelas tentang rencana pengaktifan website desa? |

K. Narasumber 11

Nama : Asmar

Jabatan : Warga Desa

Waktu : 11 Oktober 2025

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Pernahkah ibu mendengar informasi tentang website desa? |
| 2 | Bagaimana biasanya mengurus surat-surat ke kantor desa? |
| 3 | Pernahkah ibu mendapat informasi resmi tentang website desa? |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

| | |
|---|---|
| 4 | Apakah informasi website desa sampai ke ibu dengan jelas? |
| 5 | Bagaimana menurut ibu jika bisa ajukan surat online tanpa datang ke kantor? |

L. Narasumber 12

Nama : Elina

Jabatan : Warga Desa

Waktu : 12 Oktober 2025

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1 | Pernahkah Anda mendengar informasi tentang website desa? |
| 2 | Bagaimana pengalaman Anda mencoba akses website desa untuk beasiswa? |
| 3 | Bagaimana jika website aktif dan bisa upload berkas surat online? |
| 4 | Sudah konsisten kah informasi tentang status website desa? |
| 5 | Apa informasi yang kurang jelas tentang rencana pengaktifan website desa? |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kaur TU dan Umum dan Kasi Pelayanan Desa Tarai

Bangun



Wawancara dengan Warga Desa Tarai Bangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Warga Desa Tarai Bangun



Wawancara dengan Sekretaris Desa Aursati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kaur TU dan Umum



Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Aursati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Aursati



Wawancara dengan Warga Desa Aursati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Warga Desa Aursati



Wawancara dengan Warga Desa Aursati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Warga Desa Aursati